



Laporan Aktivitas

Sosialisasi & Assessment Awal

PERHUTANAN SOSIAL [PS]

Di Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan

27 – 31 Agustus 2021



“Aktivitas Sosialisasi dan Assessment Awal ini merupakan bagian dari upaya melindungi Kawasan Hutan dan Wilayah Kelola Rakyat Pulau Kalimantan dari ancaman Eksploitasi Industri Ekstraktif”.

-Save Our Borneo -





Sekilas Tentang Perhutanan Sosial



Mengacu pada **PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan** dan juga **Peraturan Menteri LHK No. 83/MENLHK/Setjen/KUM.1/2016 tentang Perhutanan Sosial**, Perhutanan Sosial [PS] adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Adat [HA], Hutan Desa [HD], Hutan Kemasyarakatan [HKM], Hutan Tanaman Rakyat [HTR], dan Kemitraan Kehutanan.

Skema dalam Perhutanan Sosial :

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Terhadap HD akan diterbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), yaitu hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Terhadap HKm akan diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu izin usaha yang diberikan kepada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Terhadap HTR akan diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yaitu izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.



Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
C. Wilayah Sasaran	5
II. HASIL ASSESSMENT & SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL	6
2.1. Profil Desa Tongka	8
2.1.1. Sejarah Desa	8
2.1.2. Letak Geografis	11
2.1.3. Jumlah Penduduk.....	12
2.1.4. Sosial, Ekonomi, dan Budaya	12
2.1.5. Potensi Wilayah.....	16
2.1.6. Potensi Yang Ingin Didorong.....	23
2.1.7. Skema PS di Tongka	24
2.1.8. Tantangan dalam Pengusulan PS wilayah Tongka	25
2.2. Profil Muara Malungai	26
2.2.1. Sejarah Sub-desa Muara Malungai.....	26
2.2.2. Letak Geografis	27
2.2.3. Jumlah Penduduk	28
2.2.4. Sosial, Ekonomi, Budaya.....	28
2.2.5. Potensi Wilayah.....	32
2.2.6. Potensi Yang Ingin Didorong	34
2.2.7. Skema PS di Muara Malungai	35
III. PENUTUP & RENCANA SELAJUTNYA.....	37



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah eksploitasi Sumber Daya Alam terutama penebangan kayu hutan di pulau Kalimantan telah terjadi sejak era tahun 1940-an, Naamloze Vennootschap (NV) Bruynzeel Dayak Houtbedrijven adalah salah satu perusahaan kayu terbesar pada saat itu. Eksploitasi hutan Kalimantan terus berlanjut hingga pemerintahan Soeharto pada akhir tahun 1967-an. Tercatat 26,5 juta ha kawasan hutan diserahkan kepada perusahaan swasta pada tahun 1972 dan 10 tahun kemudian pada tahun 1982 meningkat menjadi 31 juta ha. Kebanyakan dari semuanya berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kala itu yang menjadi sasaran utama eksploitasi adalah kayu-kayu dari hutan di wilayah Hulu Sungai Barito dan Kutai.

Eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam di Pulau Kalimantan terus berlanjut hingga saat ini, selain eksploitasi hutan melalui Konsesi Logging (HPH/ IUPHHK) dan pertambangan (emas dan batubara), juga dilakukan oleh perkebunan monokultur sawit dan Hutan Tanaman Industri. Desakan eksploitasi dari industri ekstraktif yang semakin menekan kawasan hutan hujan tropis di Kalimantan telah berakibat pada turunnya kualitas lingkungan secara drastis, hal ini telah membahayakan lingkungan dan kehidupan umat manusia. Semakin diperparah dengan minimnya kebijakan pemerintah yang nyata dalam upaya pemulihan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan kehutanan yang ada hingga saat ini dibangun diatas struktur yang bertumpu pada praktek-praktek eksploitatif dan secara umum berorientasi pada ekonomi minded. Kombinasi antara pragmatisme ekonomi dan strategi kebijakan komersialisasi sumber daya hutan mengakibatkan implementasi pengelolaan kehutanan jauh dari lestari dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat lokal didalam dan sekitar hutan.

Pemberian ijin untuk berbagai bentuk industri ekstraktif seperti HPH (IUPHHK), Hutan Tanaman, Pekebunan Sawit, dan Pertambangan dianggap sebagai pilihan yang baik dan menguntungkan, meskipun dengan mengesampingkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Baru-baru ini, pandemi Covid-19 pun dijadikan alasan agar program eksplitatif lainnya yakni Program Food Estate dapat dijalankan.





Mengingat banyaknya dampak yang dapat ditimbulkan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan dan pro masyarakat tersebut, tentu melakukan perlawanan saja tidak akan cukup. Kita perlu melakukan strategi lain, termasuk memanfaatkan celah dan kesempatan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu sendiri, seperti pada skema Perhutanan Sosial (PS).

Perhutanan Sosial kemudian dipilih sebagai strategi yang setidaknya dapat memperlambat kerusakan hutan dan lingkungan di Kalimantan secara umum, dan Kalteng secara khusus. Sebab, kesempatannya cukup besar. Dari total target Nasional untuk PS seluas 12,7 juta hektar (ha), ada seluas 1,2 juta ha untuk wilayah Kalteng, tetapi baru sekitar 0,2 % atau 205.903,95 ha yang dijadikan PS.

Meskipun dalam perjalanannya, kebijakan ini juga memiliki kelemahan. Namun, skema PS masih mungkin untuk digunakan sebagai alat “Inisiasi Perluasan Wilayah Kelola Rakyat Dan Proteksi Kawasan Hutan Dari Ancaman Eksploitasi Industri Ekstraktif.” Sehingga, paling tidak skema ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap tanah dan hutan dengan sistem pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.

Kegiatan assessment ini merupakan tindak lanjut dari rencana pengajuan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Barito Utara (Barut) dan Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Dalam rencana pengajuan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dipilih 2 wilayah sebagai pilot awal.

Kedua wilayah yang dimaksud adalah Desa Tongka dan Sub-desa Muara Malungai. Sehingga, semua isi dari laporan berikut adalah informasi-informasi awal yang dapat dikumpulkan oleh tim selama di lapangan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan assessment ini adalah mengumpulkan informasi awal terkait lokasi target yang akan diajukan.

C. Wilayah Sasaran

Adapun lokasi yang menjadi fokus assessment ini adalah,

1. Desa Tongka, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara (Barut)
2. Muara Malungai, sub-desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (Barsel).





II. HASIL ASSESSMENT & SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL

Sebagai upaya memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap Mekanisme dan tatacara pengajuan Perhutanan Sosial di masyarakat, Save Our Borneo mengajak **Perkumpulan Sawit Watch** untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan aktivitas ini. Sawit Watch dipilih menjadi mitra dalam aktivitas ini karena sebelumnya Lembaga yang berkantor di Bogor ini telah berhasil melakukan usulan Perhutanan sosial di beberapa tempat.

Tim Assessment Awal dan Sosialisasi Perhutanan Sosial yang diberangkatkan ke wilayah sasaran di Kabuten Barito Utara dan Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi 5 Orang, terdiri dari 3 Orang dari Save Our Borneo dan 2 Orang dari Sawit Watch. Kolaborasi ini cukup efektif dan mampu memberikan pemahaman tentang Perhutanan Sosial kepada masyarakat.

Tim melakukan perjalanan sejak tanggal 27 - 31 Agustus 2021. Pada tanggal 27 Agustus 2021, perjalanan dimulai dari Kota Palangka Raya menuju Desa Kandui yang berada di Kabupaten Barut. Perjalanan ini berlangsung sekitar 6 jam. Selama perjalanan ini, ada dua titik tempat peristirahatan yang memang biasa digunakan, yaitu di Tewah dan Buntok.

Keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus 2021, tim melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama tim hari itu adalah Muara Malungai, karena menurut informasi, letaknya yang paling jauh.

Berikut gambaran alur perjalanan tim:



Untuk mencapai Muara Malungai, tim harus melewati 2 Kabupaten yaitu Barut dan Barseil. Adapun desa-desa yang dilalui tim dan berada di Kabupaten Barut, Kecamatan Gunung Timang adalah Desa Kandui, Jaman, Pelari, Sangkorang, Tongka, Batu Raya I, dan Dusun Muntak Raya.

Sedangkan, desa yang berada di wilayah Kabupaten Barseil, Kecamatan Bintang Awai adalah Desa Malungai Raya dan sub-desa Muara Malungai. Muara Malungai sendiri memang belum merupakan desa definitif tetapi masih sebagai sub-desa dari desa utamanya yang bernama Bintang Ara.

Lamanya perjalanan yang di tempuh dari Kandui ke Muara Malungai adalah kurang lebih 3 jam. Perjalanan ini bisa dikatakan tidak mudah, sebab kondisi jalan yang rusak parah dan berlumpur. Beruntungnya, saat itu tim menggunakan mobil double gardan. Di Muara Malungai tim tinggal selama 2 hari satu malam. Tanpa listrik dan sinyal telepon atau internet, kecuali genset dan lampu tenaga surga untuk penerangan. Tim tiba di sana pada sore hari tanggal 28 Agustus 2021 dan melaksanakan sosialisasi Perhutanan Sosial kepada hamper seluruh warga di Aula Desa. Antusias warga cukup tinggi berpindah ke Desa Tongka sore hari pada tanggal 29 Agustus 2021.

Lamanya perjalanan dari Kandui ke Desa Tongka sendiri adalah kurang lebih 1 jam 30 menit, begitu pun sebaliknya dari Muara Malungai ke Desa Tongka. Kemudian di Desa Tongka ini tim tinggal selama satu malam dua hari. Artinya, tim tiba tanggal 29 sore, bermalam sehari, dan besok sorenya setelah kegiatan kembali ke Kandui.

Di kandui, tim bermalam. Hingga keesokan siangya, pada tanggal 31 Agustus 2021, barulah tim kembali ke Kota Palangka Raya.



2.1. Profil Desa Tongka

2.1.1. Sejarah Desa Tongka

Sejarah berdirinya Desa Tongka berawal dari inisiatif masyarakat untuk menjaga hak atas tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terpilihnya satu demi satu pemimpin untuk memimpin wilayah, menjadi cikal bakal perjalanan terbentuknya Desa Tongka yang sejak dulu dihuni oleh Masyarakat Adat Dayak Tewoyan.

Generasi pertama adalah *Temanggung Luwing Jewata Tongka*. Ia menjadi pemimpin pada tahun 1649 di Kampung Bungut Tenolung yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Setalar atau Montallat bagian hulu. Saat itu, ia dipercayakan masyarakat untuk mengurus dan menjaga wilayah tanah ulayat di Gunung Oke, Gunung Liang Lomu, Batu Nungur, Liang Tuung, Liang Ndrang, Puti Batu Jenuntu, Biyowo Lola Nayu, DAS Setalar/ Montallat bagian hulu Bungut Buyen, Gunung Tanir Nyeloi, Bungut Kenolung, Kolah Langsang, Pulu Sawa/Kolah Belam, Gunung Omun, termasuk daerah Ingai dan seluruh kawasan yang sekarang masuk ke dalam wilayah Desa Tongka.

Sisa-sisa sejarah yang menjadi bukti eksistensi masyarakat di wilayah itu adalah sampai sekarang ada delapan buah *Kaku* atau kotak kayu ulin berukuran 6 meter x 10 centimeter di Gunung Oke. Pada *Kaku* itu terdapat ukiran-ukiran bentuk tubuh

manusia, kepala kerbau, dan kepala Nyua atau Komodo yang di dalamnya ada tulang-tulang dan tengkorang manusia dengan panjang kurang lebih 6 meter.



Selanjutnya, pada tahun 1702 dipercayakan pada generasi kedua bernama *Temanggung Nyalit*, *Temanggung Juung Tentu*, dan *Temanggung Managen*. Berbeda dari sebelumnya, masyarakat di masa ini berdomisili di Gunung Liang Lomu tetapi tetap memiliki tugas mengurus dan menjaga wilayah tanah ulayat seperti disebutkan sebelumnya. Bukti dari keberadaan masyarakat di Gunung Liang Lomu,

sampai sekarang, dapat terlihat dari penggunaan kawasan ini oleh masyarakat sebagai lokasi peristirahatan lalu lintas antar dua wilayah yakni Sei Montallat dan Sei Teweh.

Pada tahun 1751 Kepemimpinan dipegang oleh *Temanggung Santep* sebagai generasi ketiga. Pada masa ini, masyarakat berdomisili di Kampung Kla'at pada DAS Setalar Putang Durui/ Montallat bagian hulu dengan tanggung jawab yang tetap sama. Bukti keberadaan masyarakat di wilayah tersebut terlihat dari adanya peninggalan barang pecah belah seperti tebel atau kerering tempat penyimpanan tulang belulang manusia. Di sana juga terdapat barang-barang antik seperti *pahet* atau guci.

Pada tahun 1803, tanggung jawab ini kembali diturunkan pada generasi keempat bernama *Malonget* yang berdomisili di Kampung Temuu Meniau Tebela. Beliau diberikan tugas untuk mengurus dan menjaga wilayah ulayat di Gunung Oke, Gunung Liang Lomu, Gunung Tanir Nyeloy, Bungut Kenolung, Kolah Lansang, Pulu Sawa/ Kolah Belam dan Gunung Omun. Bukti ekstistensi masyarakat di wilayah ini adalah adanya Kerering Tebela yang diakui oleh seluruh ahli waris dan dipercaya masyarakat sebagai benda gaib. Sebab, Kerering Tebela ini sewaktu-waktu bisa hilang atau muncul dengan sendirinya.

Selanjutnya, pada tahun 1847, kepemimpinan diberikan kepada generasi kelima bernama *Mensyiwung* yang berdomisili di Kolah Lansang. Sampai sekarang, tempat ini dikenal sebagai tempat pertapaan (*semedi*).

Hingga pada tahun 1896, kepemimpinan diturunkan ke generasi keenam bernama *Muning*. Pada masa itu, masyarakat berdomisili di Pulu Sawadan Kolah Belam. Adapun bukti keberadaan masyarakat pada masa itu adalah dengan adanya peninggalan berupa Kaku berbentuk kotak atau peti yang digunakan untuk tempat penyimpanan tulang-tulang dan tengkorak manusia yang dimasukkan ke dalam goa atau liang di tebing gunung batu dengan ketinggian kurang lebih 75 meter dari permukaan tanah. Pada tebing batu tersebut juga ditemukan ada banyak sarang lebah madu dan di sekitar gunung batu ada juga ditemukan beberapa gua atau liang tempat burung Walet bersarang.

Sedangkan, nama Tongka sendiri mulai disebut dan diresmikan pada tahun 1937 sebagai Kampung. Kampung Tongka menjadi pemukiman bagi kelompok peladang Dayak Tawoyan yang disebut *Bantai*. Sejak saat itu pula, Tongka mulai memiliki kepala Kampung. Meski begitu, kepemimpinan turun temurun sebagai penjaga wilayah tanah ulayat tetap berlanjut dan diturunkan kepada generasi ketujuh pada tahun 1943. Generasi ketujuh dipercayakan kepada *Keneh*, seorang perempuan, keturunan dari *Temanggung Luming Jewata Tongka*. Ia dan keluarganya berdomisili di Gunung Omun dimana sampai sekarang di sana masih dapat ditemukan Kaku berbentuk kotak atau peti tempat penyimpanan tulang-tulang dan tengkorak manusia.

Pada tahun 1943 itu pula terjadi perang gerilya antara Masyarakat Dayak Tawoyan melawan Belanda. Belanda bahkan sempat memasang patok di Gunung Perewali Lisat, Tuan Adji, dan puncak Gunung Oke. Dalam peperangan itu, tokoh-tokoh adat suku Dayak Tawoyan bersepakat mendirikan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Benteng Ingai yang terletak di bagian hulu Sungai Setalar atau Montalat, di bagian hulu pemukiman Masyarakat Kampung Tongka.





Hingga setelah perang usai, diketahui ada dua orang masyarakat Kampung Tongka yang menjadi korban karena ditembak oleh Belanda. Kedua pejuang itu bernama *Malik* alias *Marura* dan *Djumi*. Awalnya, kedua orang ini dimakamkan di Tongka. Namun, setelah Indonesia Merdeka, tulang-tulang keduanya dipindahkan oleh Kodim Kabupaten Barito Utara bersama Camat Gunung Timang dan instansi terkait pada 17 Agustus 1963 ke Makam Pahlawan di Kandui.

Selanjutnya, pada tahun 1980, Kepemimpinan generasi ke delapan dipercayakan kepada *Mani. T* untuk mengurus dan menjaga tanah ulayat Dayak Tewoyan. Hingga pada tahun 2009 diturunkan kepada generasi kesembilan bernama *Edi Sumantri*.

Selain urutan kisah sejarah di atas, berikut riwayat kepemimpinan Kepala Kampung hingga Kepala Desa yang pernah memimpin Tongka.

NO	N A M A	TAHUN MENJABAT	AHIR JABATAN	KETERANGAN
1.	ENDO	1937	1941	Kepala Kampung
2.	RAPUT	1941	1944	Kepala Kampung
3.	MANTIR	1944	1947	Kepala Kampung
4.	NGESAU	1947	1952	Kepala Kampung
5.	KUDI	1952	1964	Kepala Kampung
6.	ADIPATI RAWIH	1964	1987	Kepala Desa
7.	SETUP	1987	1990	Kepala Desa
8.	MANI	1990	1998	Kepala Desa
9.	JAMUAN	1998	2001	PJ. Kepala Desa
10.	ARTONADI	2001	2008	PJ. Kepala Desa
11.	SUPRIADI	2008	2009	PJ. Kepala Desa
12.	EDI SUMANTRI	2009	2015	PJ. Kepala Desa
13.	MALISEI	2015	2016	PJ. Kepala Desa
14.	BAMBANG ALI TOPAN	2016	SEKARANG	Kepala Desa

2.1.2. Letak Geografis

Desa Tongka berada di Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara (Barut). Desa ini memiliki topografi yang dominannya berupa dataran bergelombang dan berbukit, serta dikelilingi oleh sungai. Berdasarkan dengan hasil pengukuran masyarakat, yang mengetahui wilayah desanya secara turun-temurun, Desa Tongka memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 55.000 hektar. Desa Tongka adalah desa terakhir yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Montallat, anak sungai Barito. Wilayah hulu dari Sungai Montallat adalah Pegunungan Meratus yang berada di Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan.





Adapun jarak Desa Tongka dari ibu kota Kecamatannya adalah 27 kilometer. Sedangkan dengan ibu kota Kabupaten, Muara Teweh, adalah 87 kilometer.

2.1.3. Jumlah Penduduk

Desa Tongka dihuni oleh Masyarakat Adat Dayak Tewoyan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara¹, Desa Tongka memiliki jumlah penduduk sebesar 791 jiwa dengan 426 laki-laki dan 365 perempuan.

Berdasarkan keterangan pihak Desa, Tongka memiliki 256 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah itu juga, sebaran penduduknya dibagi ke dalam 9 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW).

2.1.4. Sosial, Ekonomi, dan Budaya

a. Sosial

Masyarakat Desa Tongka sebagian besar masih memeluk agama kepercayaan Kaharingan, yang oleh pemerintah Indonesia dianggap menjadi satu bagian dengan agama Hindu. Meski begitu, ada juga agama-agama lain seperti Islam, Kristen Protestan, dan Katholik.

Meski mayoritas memeluk kepercayaan Kaharingan, namun Desa Tongka belum memiliki Balai Basarah yang menjadi tempat peribadatan mereka. Data BPS Kabupaten Barut menyebutkan bahwa fasilitas keagamaan yang tersedia saat ini adalah 2 Masjid, 1 Langgar, dan 1 Gereja.

Sementara itu, fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Tongka hanya berupa 1 Taman Kanak-kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), masyarakat

¹ <https://barutkab.bps.go.id/statictable/2017/10/05/1069/-jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-desa-kelurahan-di-gunung-timang-2016.html>



masih harus pergi ke Desa Batu Raya dan Kandui. Untuk penunjang kesehatan masyarakat di Desa Tongka terdapat tenaga kesehatan sebanyak 1 orang dan dukun bayi sebanyak 3 orang.

Pemenuhan kebutuhan sumber air untuk Desa Tongka, mayoritas masyarakat berasal dari air sungai langsung yang berada di dalam desa dan kampung. Untuk kebutuhan listrik berjumlah 282 pengguna, sebanyak 254 keluarga yang memanfaatkan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebanyak 28 keluarga yang memanfaatkan sumber listrik Mandiri. Untuk jaringan signal komunikasi, tidak ada jaringan signal provider yang masuk ke dalam desa, akan tetapi tingkat penggunaan Handphone masyarakat cukup tinggi.

b. Sumber Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Tongka beprofesi sebagai petani. Sehingga mata pencaharian utama mereka adalah dari bertani dan berladang. Mayoritas jenis tanaman yang dikembangkan masyarakat adalah padi, jagung, cokelat, pisang, dan karet.

- Padi

Padi sebenarnya tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Menurut masyarakat, padi gunung rutin mereka tanam setahun sekali hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, bukan untuk dijual. Kecuali hasil panen yang didapat surplus, maka terkadang padi bisa dijual.

Di Desa Tongka, banyak masyarakat yang sudah memiliki mesin penggilingan padinya sendiri. Namun, bagi yang belum memiliki mesin sendiri bisanya ada biaya ataupun barter yang harus mereka lakukan untuk bisa menggiling padi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, biaya penggilingan padi menjadi beras adalah sebesar Rp. 800,- per kilogram (kg). Tetapi bisa juga dibayar dengan menggunakan beras sesuai dengan harga beras dijual per





kilogram di pasaran. Misalnya, padi yang digiling sebanyak 30 kg maka 30 x Rp. 800,- = Rp. 24.000 Sementara itu, diketahui harga beras di pasaran adalah Rp. 10.000,- Maka yang bersangkutan akan membayar biaya penggilingan padi dengan beras sebanyak 2,4 kg.

- Jagung

Pemasaran jagung di Desa Tongka masih melalui tengkulak (pengumpul). Harga jagung saat ini adalah Rp. 2.000,- per kilogram. Harga ini berlaku untuk jagung yang dijual beserta tongkolnya.

Menurut pengakuan masyarakat, biasanya jagung-jagung ini dijual tengkulak kepada pabrik-pabrik yang ada di Kalimantan Selatan atau pun Kalimantan Tengah yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pakan ternak.

- Cokelat/Kakao

Pemasaran cokelat/kakao di Desa Tongka juga masih dipegang oleh tengkulak. Adapun harga normal per kilogram cokelat biasanya berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 30.000,-

Namun, pada waktu-waktu tertentu ketika cokelat langka, harga jualnya bisa mencapai Rp. 40.000,-

- Pisang

Sama seperti yang lain, pemasaran pisang juga dikuasai oleh tengkulak. Harga jual pisang apabila dipanen oleh pemilik adalah Rp. 3.000,- tetapi apabila dipanen oleh pembeli sendiri hanya Rp. 2.500,- Jenis pisang yang dibudidayakan biasanya adalah pisang ambon dan mahuli.



- Karet

Menyadap karet masih dilakukan oleh masyarakat Desa Tongka sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Saat ini, harga karet berkisar Rp. 9.000,- per kilogram.



Namun, pekerjaan menyadap karet ini diakui masyarakat hanya dilakukan jika hari tidak hujan. Sementara apabila di musim hujan, masyarakat akan kesulitan melakukan pekerjaan ini sehingga perlunya memiliki sumber pendapatan yang lain.

c. Budaya

Sebagai Desa Asli, yang memang dihuni oleh Masyarakat Adat bernama Dayak Tawoyan, Desa Tongka masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhur yang dianut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu tidak lepas dari kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di sana.

Situs-situs adat masih ada dan terjaga sampai sekarang. Selain itu, praktek-praktek adat dan budaya masih dilakukan, seperti ritual saat musim berladang dan pernikahan. Sistem pertanian ladang berpindah masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tongka. Sistem ini memberikan waktu untuk lahan yang sebelumnya telah di pakai beregenerasi, sehingga aktivitas berladang selanjutnya dilakukan pada lokasi lahan yang berbeda.

Selain itu, masyarakat Desa Tongka juga melestarikan hutan dengan tidak melakukan aktivitas seperti perladangan di daerah hutan primer, hanya sekunder. Mereka juga masih memiliki wilayah-wilayah tertentu di hutan yang

bersifat sakral yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang ataupun beraktivitas di sana. Namun, pada assessment pertama ini, memang hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan adat belum banyak dilakukan penggalan lebih mendalam.

2.1.5. Potensi Wilayah

Berdasarkan assessment awal di lapangan, kami mendapati beberapa data mengenai potensi desa yang menarik dari masyarakat, antara lain:

1. Keragaman Keanekaragaman Hayati



Flora

No.	Tumbuhan Komersial	No.	Buah-buahan
1.	Puti	1.	Durian
2.	Bilas	2.	Layung
3.	Lomu	3.	Ketungen
4.	Ulin	4.	Tewola
5.	Mentiohok	5.	Paken
6.	Meranti	6.	Rengarai
7.	Sintuk	7.	Lenamun
8.	Nyatu	8.	Beliti
9.	Panting	9.	Ontip
10.	Irat	10.	Reket
11.	Merijang	11.	Puron
12.	Sungkai	12.	Terengalen
13.	Bengkirai	13.	Keramu
14.	Karuing	14.	Pepuan
15.	Pantung	15.	Sesori
16.	Lelutung	16.	Toyep
17.	Mliomit	17.	Pekalung
18.	Pangin	18.	Oput
19.	Kelapeh	19.	Peputu
20.	Ulu	20.	Semayap
21.	Benuang	21.	Buku
22.	Ipung	22.	Letaan
23.	Siopot	23.	Sosa
24.	Mina	24.	Ensem Bulau
25.	Mengosi	25.	Ensem Payang
26.	Anglai	26.	Ensem Nedrang
27.	Peraro	27.	Ensem Peripis
28.	Minda	28.	Ensem Buyung Balang
29.	Nunuk	29.	Ensem Bawang
30.	Tepuro	30.	Ensem Kelau
31.	Mensiwung	31.	Ensem Apui
32.	Pelepek	32.	Lisat
33.	Serdendem	33.	Buneh
34.	Enep	34.	Kenis
35.	Maya Okang	35.	Rosok



36.	Biwan	36.	Leposu
37.	Kelapeh ndrang	37.	Tinok
38.	Kekuluk	38.	Same
39.	Merumung	39.	Cempedak
40.	Umar	40.	Tampang

No.	Tumbuhan Obat-obatan	No.	Jenis Rotan
1.	We Menyame	1.	We Meno
2.	Pasak Bumi	2.	We Sidong
3.	Seluang Belum	3.	We Danan
4.	Kareho	4.	We Tu,u
5.	Pengawer	5.	We Boyung
6.	Kelokop mea, bura	6.	We Soke
7.	Tengker Nyamei	7.	We Bemulau
8.	Selegigi Niang	8.	We Remoro
9.	Kemenai	9.	We Mea
10.	Kelongking Torik	10.	We Ikui Angkis
11.	Anggrek	11.	We Soke Tapah
12.	Teraran	12.	We Si, it pait
13.	Tekale	13.	We Lalun
14.	Deraya	14.	We Peles
15.	Lukut	15.	We Belesikan
16.	Lepotung	16.	We Irit
17.	Bekakang	17.	We Bulu
18.	Lemasi		
19.	Seweau		
20.	Emung		
21.	Semeneo		
22.	Teruak Joleu		
23.	Tewok		
24.	Timok Beliku		
25.	Tiwak Tawai		
26.	Timang		
27.	Keliat		
28.	Suri		
29.	Ara		
30.	Samsemot		

Fauna

No.	Binatang Khas	
1.	Sapi Hutan	11. Macan Dahan
2.	Rusa	12. Kelawat
3.	Kijang	13. Monyet
4.	Babi	14. Beruk
5.	Beruang	15. Ayam Hutan
6.	Kancil	16. Burung Merak
7.	Landak	17. Burung Lesio
8.	Trenggiling	18. Burung Jotung
9.	Beruang	19. Burung Tiong
10.	Macan Tutul	20. Burung Betet



2. Tutupan Hutan masih Baik

Desa Tongka masih memiliki tutupan hutan yang bagus dan dalam kondisi baik. Sebab, sepanjang pengamatan tim, belum ditemukan adanya pembukaan hutan/ lahan di wilayah ini.

Di Desa Tongka belum ada pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, memang ada beberapa ijin tambang yang sudah diberikan di wilayah ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada perusahaan tambang yang operasional.

3. Situs-Situs Budaya dan Sejarah

a. Gunung Oke dan Bungut Tenolung

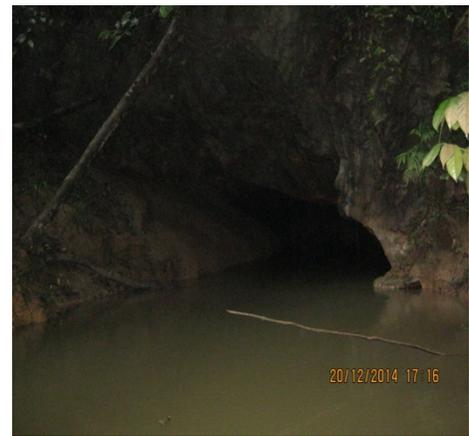
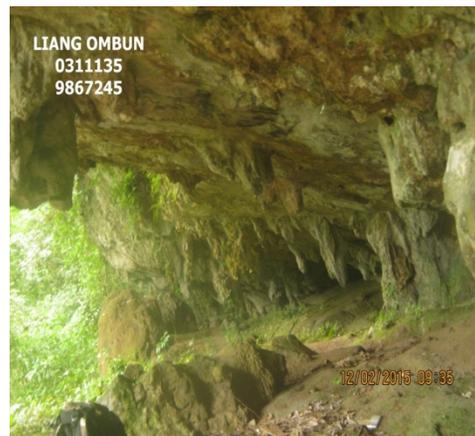
Di wilayah ini terdapat situs sejarah berupa sandung yang berisikan tengkorak dan tulang belulang manusia, tepatnya pada puncak Gunung Oke.



b. *Liang Ombun*

Liang atau gua Ombun adalah situs peninggalan sekaligus bukti sejarah dimana dahulu merupakan tempat bermukim keterunan Temanggung Lumbing Jewata Tongka, Muara Setowan, dan Mining. Liang Ombun juga biasa dijadikan sebagai tempat beristirahat.

Selain itu, menurut sejarah, di gua ini juga pernah diletakkan tengkorak Isam. Isam adalah salah satu pejuang pada masa peperangan melawan Belanda. Isam ditembak mati saat pergi ke Desa Sampirang I atau Batu Serau oleh penjajah Belanda pada tahun 1943.



c. *Tanir*

Tempat ini adalah tempat pemakaman Tanir, beserta beberapa rekanya. Tanir sendiri adalah keturunan dari pendiri Desa Tongka, *Temanggung Lumbing Juwata Tungka*.

Di dalamnya kita dapat menemukan tengkorak di dalam sandung. Selain itu, dapat juga ditemukan sarang lebah madu yang menempel di tebing batu bahkan puing-puing guci.



- d. *Jantur Eto/Air Terjun*
Jantur Eto adalah salah satu keindahan alam yang ada di Desa Tongka. Air terjun ini adalah air terjun alami yang mengalir di dalam hutan alam Desa Tongka.



- e. *Batu Gadur*
Batu Gadur adalah sebuah batu dimana pada bagian tengahnya terdapat cekungan atau lubang yang membuat air dapat terkandung di dalam cekungan tersebut. Batu ini berada di jalan lintas antara Desa Tongka dengan Sampirang I (Anyir Bewe).

Gadur sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti baskom. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), baskom memiliki arti sebagai tempat air pencuci tangan atau muka.



Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu ini memiliki khasiat dapat membuat seseorang awet muda. Kepercayaan ini telah mereka pegang secara turun-temurun sejak zaman leluhur atau tetua-tetua dahulu.



Air ini bahkan bisa dibawa pulang dan disimpan di rumah-rumah masyarakat. Mereka percaya khasiatnya tidak akan hilang selama mengikuti syarat-syarat ritual sebagaimana yang leluhur ajarkan. Bahkan, saat musim kemarau sekalipun air di dalam cekungan batu ini tidak akan kering.



f. *Ingai*

Ingai adalah nama sebuah benteng. Benteng Ingai ini didirikan pada tahun 1943 oleh tokoh-tokoh adat suku Dayak Tewoyan yang dipimpin oleh keturunan dari Temanggung Lumbing Jewata Tongka bernama Temanggung Kenten.

Pada masa itu, benteng ini digunakan sebagai tempat pertahanan. Sementara sekarang, benteng ini dikenal sebagai simbol pertahanan masyarakat terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Menurut sejarah yang diketahui masyarakat, dahulu benteng ini juga sempat menjadi tempat pelarian atau pengungsian bagi Raja Banjar bernama Pangeran Antasari.



Dahulu, benteng ini terbuat dari bamboo-bambu kecil yang dalam Bahasa tawoyan disebut tamiang. Sedangkan pada masa kini, peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat dari benteng ini adalah sumur Raja dan kerering yang terbuat dari kayu ulin.

g. *Liang Daong*

Liang Daong adalah bukti sejarah tentang pernah adanya perkampungan di wilayah ini. Bekas perkampungan saluh (Balik) ini sekarang telah menjadi batu.



h. Gunung Sia Semu/Liang Solai

Tempat ini dipercaya digunakan sebagai tempat orang-orang tua pada zaman dahulu menyimpan harta karun. Namun, harta karun itu tersimpan secara gaib sampai sekarang.

Tempat ini dikeramatkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tongka. Tempat ini dipercaya masih sering digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan yang tertentu pula. Namun, sekarang tempat ini bisa dikatakan tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan lokasinya yang diperuntukkan untuk transmigrasi. Hingga sekarang dihuni oleh masyarakat 'eks-transmigrasi' dan menjadi desa definitif bernama Batu Raya I.



i. Teluyen Ringai

Sebenarnya Teluyen Ringai adalah sebuah pohon ulin. Namun, di dalam pohonnya ini, terdapat makam seorang masyarakat Tongka bernama Ringai.



2.1.6. Potensi Yang Ingin Didorong

Berdasarkan hasil assessment di lapangan, berikut beberapa potensi di desa Tongka yang dapat didorong:

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, banyak potensi-potensi HHBK yang dapat kita dorong dari Desa Tongka. HHBK yang dapat kita manfaatkan seperti madu hutan, rotan, tanaman hias seperti anggrek, hingga buah-buahan.

Namun, tentu saja perlu diskusi dan rencana lebih lanjut dengan masyarakat terkait hal berikut.

2. Ekowisata

Di Desa Tongka, masih banyak situs-situs sejarah yang juga sakral dan bernilai adat serta budaya. Selain itu, tutupan hutan yang masih bagus juga membuat Tongka menyimpan banyak keindahan alam seperti air terjun hingga keanekaragaman hayati hutan hujan tropisnya. Hal ini tentu berpeluang menjadikan Desa Tongka sebagai salah satu destinasi wisata alam.

Ekowisata merupakan salah satu potensi yang menjanjikan untuk di dorong di Desa ini. Sebab, tidak hanya akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat dijadikan sarana untuk edukasi lingkungan, sosial, dan budaya.

3. Wana Tani (Agroforesti)

Sebagian besar penduduk Desa Tongka memang didominasi oleh petani dan peladang, sehingga mendorong agroforesti bersama masyarakat desa ini menjadi salah satu poin yang penting.

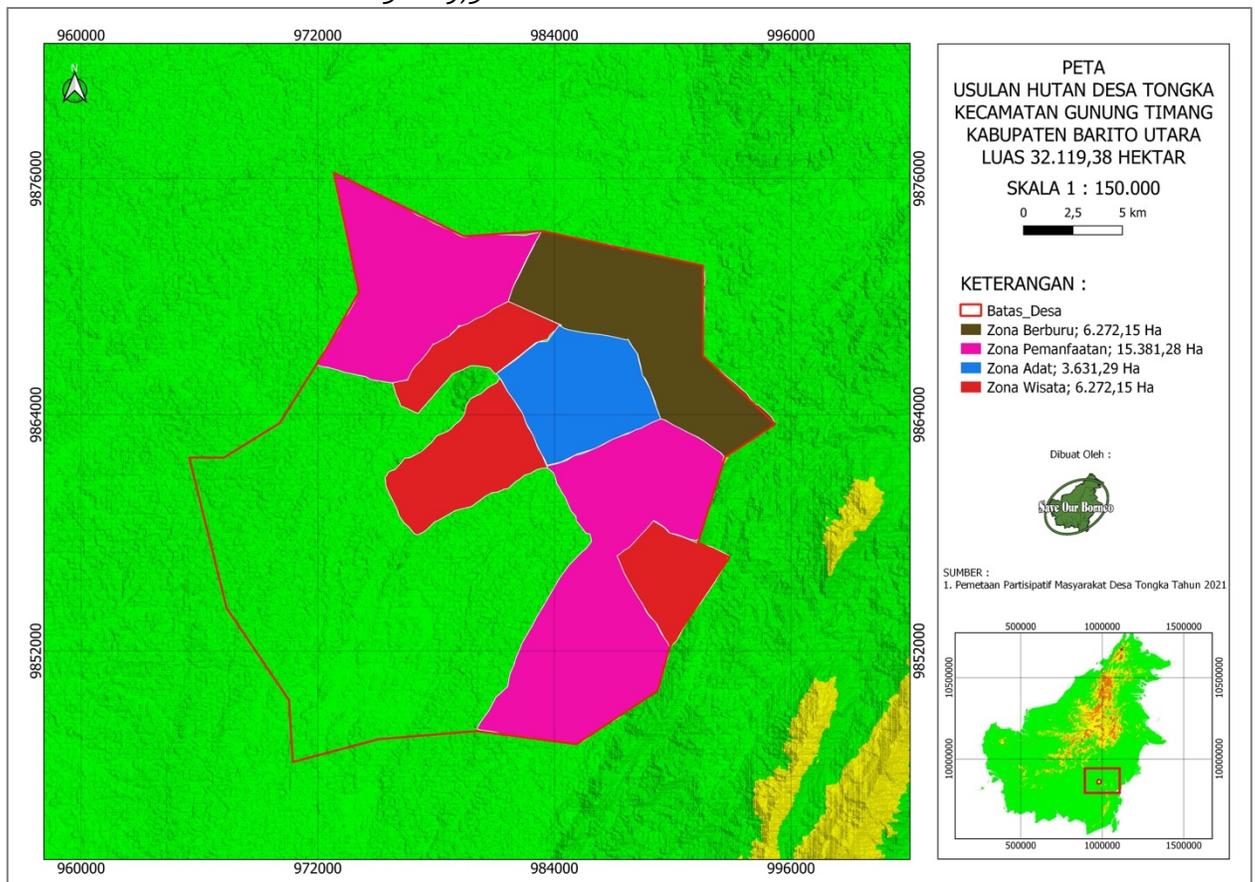
Dengan memaksimalkan potensi tanaman pertanian maupun hutan yang memang sudah dikenal sangat baik oleh masyarakat, konsep agroforesti cocok diterapkan pada masyarakat Desa Tongka.



2.1.7. Skema PS di Tongka

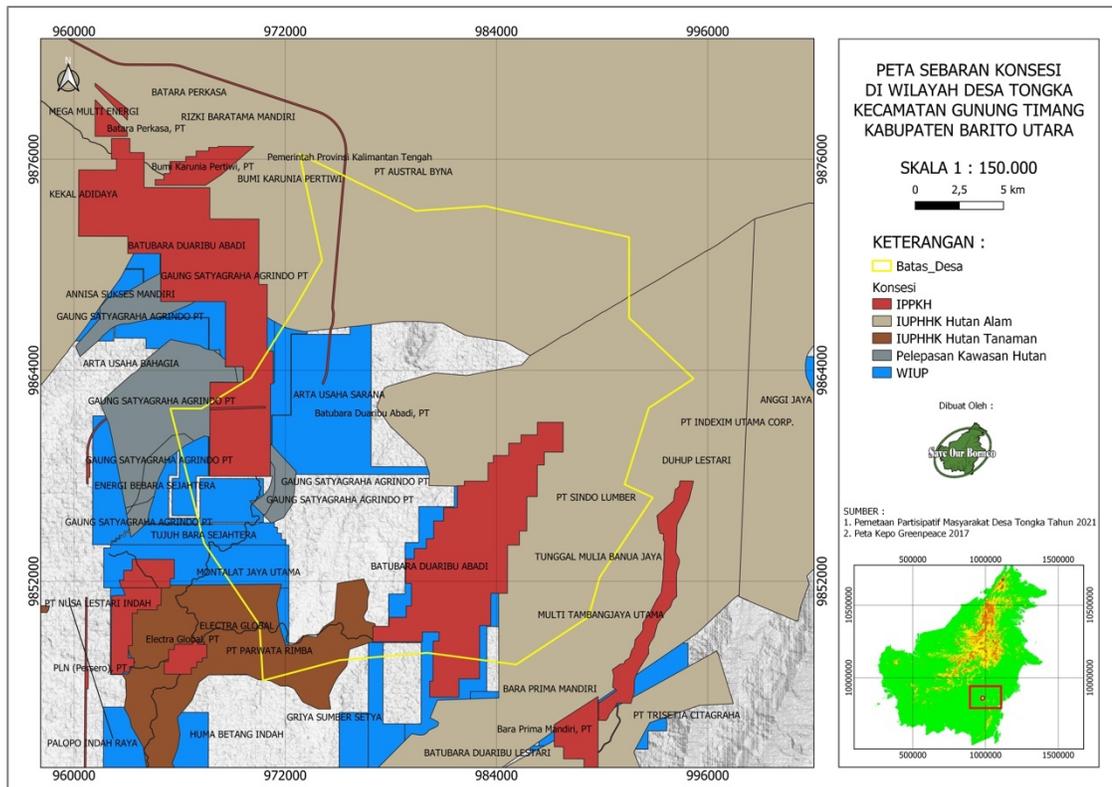
Pada assessment ini, selain mengumpulkan informasi awal, tim juga disambut baik oleh Masyarakat. Gagasan mengenai skema Perhutanan Sosial (PS) dianggap menarik oleh Masyarakat.

Sehingga, pada hari itu, tim juga melakukan sosialisasi dan juga diskusi dengan Masyarakat Desa Tongka di Kantor Kepala Desa. Selain menjelaskan tentang 5 skema yang ditawarkan dalam PS, tim juga memfasilitasi masyarakat dalam hal persiapan kelengkapan dokumen maupun data yang dibutuhkan untuk pengajuan. Hasilnya, masyarakat dan pemerintah Desa Tongka sepakat akan mengajukan skema Hutan Desa (HD). Adapun luas wilayah yang diajukan untuk HD ini adalah seluas 32.119,38 hektar.



Persiapan dan upaya melengkapi dokumen dan data sampai saat ini masih terus berlangsung, termasuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Dalam semua tahapan ini, masyarakat Desa Tongka bersama pemerintah desanya sendiri yang terlibat langsung, dengan tetap didampingi oleh tim SOB.

2.1.8. Tantangan dalam Pengusulan PS wilayah Tongka



Meskipun mayoritas masyarakat Desa Tongka telah sejak dahulu mengelola, menjadaga dan melindungi wilayahnya secara lestari dengan kearifan local yang dimilikinya, namun sampai sekarang mereka belum memiliki legalitas dalam pengelolaannya. Sampai saat ini fakta yang terjadi di lapangan terdapat berbagai ancaman, Perampasan hak-hak masyarakat oleh berbagai korporasi (Tambang dan IUPHHK), selain itu ancaman terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tongka masih terjadi hingga saat ini.

Peningkatan pertumbuhan Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam masih menjadi andalan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, hal ini terlihat dari banyaknya perizinan yang telah diberikan untuk Korporasi Tambang dan IUPHHK dikawasan hutan di wilayah Desa Tongka, sedangkan skema perhutanan sosial seperti nya masih dianggap usaha non produktif yang tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah/ nasional. Hal ini menjadi tantangan terberat, namun bukan berarti tidak mungkin diperjuangkan. Hal ini harus terus diperjuangkan, karena skema perhutanan sosial ini memberikan masyarakat keleluasaan mengelola dan menjaga tutupan hutan, sekaligus menahan serangan dari pihak lain yang ingin merambah kawasan hutannya.



2.2. Profil Muara Malungai

2.2.1. Sejarah Sub-desa Muara Malungai

Muara Malungai atau biasa disebut Malungai, menurut sejarah terbentuk karena adanya para peladang nomaden yang kemudian memutuskan tinggal menetap di *Gunung Bawo Datai Danum Kematang Ayoh Melungai* dan sekitarnya. Adapun nama masyarakat atau suku yang mendiaminya adalah *Dayak Bawo Lawangan Penyekuru Kinso Datai Danum Gunung Bawo (DBLPK-DDGB)* atau disebut Dayak Lawangan.

Sebenarnya, keberadaan masyarakat adat DBLPK-DDGB ini terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan lokasi tinggalnya, yaitu:

1. Bawo Tengah (Botuk) Ayoh Melungai Rumbak setenewa/senteneu Ayoh Bura Tedok Tolang Hulau Lebek Siopat, Penyekuru Kinso
2. Bawo Hulu (Dayei) Kiring Tungku Lalung Nyarung Pasuang Daya Latinsing Nawelu
3. Bawo Hilir (Siwau) Lukeng Hali Karan

Nenek moyang mereka disebut Datuk Kakek Ayoh Malungai. Bersama keturunannya, ia mengelola wilayah tersebut. Di wilayah itu, aktivitas perladangan biasa mereka lakukan di Tompong Toyau, sebutan bagi wilayah yang memang dikhususkan untuk berladang.

Masyarakat ini memang hidup bergantung dengan alam. Meski berladang, mereka juga mengumpulkan hasil hutan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana cara hidup ini tetap berlanjut sampai sekarang.

Nenek moyang mereka biasa menandai keberadaan dan kawasan kelola mereka. Beberapa hal yang biasa dijadikan sebagai tanda adalah adanya lokasi tanam-tumbuh, kayu lurus durian, ulin, kayu raja tempat lebah madu biasa bersarang, meranti, tengkawang, rotan, patung-patung yang dibuat dari kayu ulin, hingga puing-puing bekas pemukiman.



2.2.2. Letak Geografis

Muara Malungai adalah sub-desa dari desa induknya yang bernama Desa Bintang Ara. Statusnya belum sebagai desa definitif. Lokasi tepatnya berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (Barsel).

Muara Malungai merupakan wilayah terakhir yang berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayus. Tutupan lahannya masih rapat dan belukar dengan topografi dominan adalah berbukit atau curam. Muara Malungai berada pada ketinggian 400 – 500 mdpl.

Berikut adalah batas-batas yang ada pada Muara Malungai:

- Sebelah Utara : Desa Tongka, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barut
- Sebelah Selatan : Desa Dambung Raya, Doroi, Misim, Tutui
- Sebelah Timur : Desa Muara Mea, Kec. Gunung Purei, Kabupaten Barut
- Sebelah Barat : Desa Patas

Jarak Desa Bintang Ara, terutama sub-desa Muara Malungai ke Buntok, pusat pemerintahan Kabupaten Barsel, berjarak sekitar 125 km dengan kondisi jalan menuju jalan Negara dari sub-desa Muara Malungai ialah melalui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara. Kondisi jalannya adalah tanah



berlubang, serta jalan aspal kecil yang melalui jalan perusahaan dan jalan Transmigrasi di daerah Batu Raya.



2.2.3. Jumlah Penduduk

Muara Malungai secara umum diketahui dihuni oleh masyarakat adat Dayak Lawangan. Menurut informasi dari masyarakat setempat, jumlah penduduknya kurang lebih sebanyak 500 jiwa. Namun, memang belum diketahui secara detail berapa persentasi penduduk laki-laki dan perempuannya karena sulitnya mencari dan mengumpulkan data disebabkan status Muara Malungai yang hanya sebagai sub-desa dari Desa Bintang Ara.

2.2.4. Sosial, Ekonomi, Budaya

1. Sosial

Perjalanan memasuki Muara Malungai tidaklah mudah. Akses jalan rusak dan berlumpur. Selain itu juga, banyak dari jalannya masih sempit dan hanya memiliki jembatan kayu sederhana.



Wilayah ini tampak terisolir, padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari desa terdekat. Muara Malungai juga belum memiliki listrik. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, mereka memanfaatkan tenaga surya maupun genset. Begitu pun dengan sinyal telepon dan internet, masih belum menjangkau daerah ini. Namun, lingkungannya memang masih hijau dan asri.

Muara Malungai didominasi oleh masyarakat adat yang masih memeluk teguh ajaran kepercayaan Kaharingan. Sekitar 75% penduduknya masih bertahan dengan kepercayaan nenek moyang ini.





Secara administratif, Muara Malungai belum memiliki status sebagai desa definitif. Hal ini menjadikan mereka masih sebagai pecahan atau sub-desa dari Desa utama bernama Bintang Ara. Sehingga, Muara Malungai tidak memiliki Kantor Desa, sebab Kepala Desa dan Sekertaris Desa berdomisili di Bintang Ara.

Di Muara Malungai hanya ada 2 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara yang menjadi perwakilan dari perangkat Desa. Sementara itu, Ketua BPD tetap berada di Desa Bintang Ara bersama 2 anggota BPD lainnya lagi.

Sedangkan pada struktur adatnya, jabatan tertinggi dipegang oleh Damang, kemudian Penghulu, dan terakhir adalah Mantir. Meski hanya sub-desa, Mauara Malungai tetap memiliki sruktur kepemimpinan adat yang cukup baik.



Mereka memiliki satu Penghulu, sedangkan seperti umumnya, Damang berada di Kecamatan. Penghulu ini berperan sangat penting yakni untuk mengatasi konflik di masyarakat, upacara pernikahan hingga upacara adat.

Penghulu juga mengepalai 4 orang mantir. Keempat orang mantir ini masing-masing berasal dari agama yang ada di Maura Malungai, yaitu Kaharingan, Islam, Kristen, dan Katholik.

Sejauh pengamatan di lapangan, fasilitas kesehatan di Muara Malungai hanya ada satu yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu). Di Pustu ini hanya ada 1 orang bidan.



Untuk fasilitas pendidikan, di Muara Malungai telah ada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, untuk Taman Kanak-kanak (TK), mereka masih harus mengantarkan anaknya ke Desa Malungai Raya. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka juga masih harus keluar dari Muara Malungai menuju ke desa-desa sekitar.

2. Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat di Muara Malungai adalah berladang. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai penyadap karet dan peladang padi. Namun, memang berladang padi umumnya masih dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Apabila surplus dan memang ada pembeli, barulah beras itu mereka jual.

Selain padi dan karet, masyarakat juga mencoba usaha dari tanaman pertanian lain. Sejauh ini, mereka jagung sebagai tanaman alternatif lain untuk tambahan ekonomi.

Dari karet, masyarakat mengaku memperoleh harga jual berkisar Rp.8.000,- Paling tinggi harga jualnya dapat dapat mencapai Rp.9.000; hingga Rp.10.000; Namun, pemasaran karet ini pun masih melalui tengkulak atau pengumpul.

Sedangkan untuk komoditas jagung, masyarakat mengaku baru mencobanya kurang lebih selama satu tahun ini. Harga jual umumnya adalah Rp.2.000; per kilogram jika tengkulak datang langsung ke petani. Namun, jika diantar oleh petani sendiri harga bisa naik menjadi Rp.3000; Apalagi jika jagung dijual bersih tanpa tongkolnya, harga bisa mencapai Rp.4.000; per kilogram.



Meski jagung cukup menjanjikan, tetapi masyarakat mengaku banyak kendala yang mereka hadapi. Pertama, mereka seringkali kesulitan mendapat pupuk urea dan poska. Mereka masih berharap adanya bantuan dari pemerintah, sebab jika harus membeli harganya mahal dan akses jalan juga masih sulit. Sehingga, mereka harus berusaha mencari pupuk keluar wilayah mereka.

Kedua adalah sulitnya mendapatkan bibit jagung yang baik. Kecuali masyarakat sendiri yang menyediakan bibit lokal, umumnya mereka juga masih mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah.

Selain itu, akses jalan yang tidak cukup baik juga seringkali menghambat aktivitas jual beli mereka kepada tengkulak. Seringkali tengkulak/pengepul tidak mau ke Muara Malungai karena rusaknya jalan, sehingga masyarakat yang harus berusaha mengantarkan hasil pertanian mereka.

Jumlah muatan yang mereka bawa pun tidak bisa terlalu banyak. Sebab, mereka harus bisa memperkirakan berapa banyak hasil pertanian, baik karet maupun jagung, yang bisa mereka bawa dengan kondisi jalan yang ada dan sederhananya jembatan kayu yang tersedia.



3. Budaya

Aktivitas ladang berpindah masih menjadi budaya masyarakat Dayak Lawangan di Muara Malungai. Dalam berladang, mereka masih menaati aturan-aturan dari nenek moyang mereka, termasuk melakukan ritual-ritual adat untuk pembukaan lahan baru.

Pertama, mereka hanya membuka ladang di daerah tanam tumbuh, tidak disembarang lahan yang ada di hutan. Lahan yang bisa digunakan untuk berladang kembali, biasanya usianya dapat berkisar mulai 5 – 25 tahun atau dengan kata lain harus dibiarkan beregenerasi terlebih dahulu. Ladang mereka ini disebut Tana.

Selain itu, sebagai pemegang kepercayaan Kaharingan, hampir semua upacara adat masih mereka lakukan. Misalnya, upacara pemakaman yang disebut Wara, upacara penyembuhan oleh Belian, upacara pernikahan, dan lain sebagainya.

2.2.5. Potensi Wilayah

Pada bagian ini, sebenarnya, belum banyak data dan informasi lengkap yang berhasil dikumpulkan. Namun, berikut beberapa informasi awal yang dapat dihimpun di lapangan:

1. Keragaman Keanekaragaman Hayati

Tumbuhan Komersial	Buah-buahan	Kayu/Pohon
Damar	Durian	Kayu Lurus
Gaharu	Cempedak	Kayu Ulin
Rotan	Layung	Kayu Benuas
Bambu	Pepaken	Kayu Tengkawang
Karet	Langsat	Kayu Raja
Kopi	Rambutan	Kayu Wilas
	Enau	Kayu Jekumu
	Rembiya	Kayu Meranti
	Asam Katungan	Kayu Sintuk
	Buku	Kayu Karuing
	Kalasu	Kayu Pungsi
	Siwau	Kayu Mahang
	Tengaring	Kayu Bawang
	Kelapa	Kayu Gahang
	Pinang	





2. Malungai dengan Tutupan Hutan Masih Baik

Muara Malungai masih memiliki tutupan hutan yang cukup bagus. Adapun status kawasannya adalah Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas.

Namun, di wilayah ini belum ada pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Memang telah ada puluhan titik di wilayah ini yang diperuntukkan untuk konsesi pertambangan (KP) batu bara, tetapi industri ini belum berjalan atau operasional.

3. Situs Budaya dan Sejarah

Menurut masyarakat, di Muara Malungai masih terdapat banyak situs budaya dan sejarah. Hanya saja, masyarakat memang belum memiliki dokumentasi yang cukup baik sejauh ini.

Namun, tempat-tempat itu memang tidak mudah ditemui kecuali dengan melakukan ekspedisi khusus ke dalam hutan. Meski begitu, hal-hal seperti ini bisa menjadi potensi yang menjanjikan untuk ekowisata ke depan.

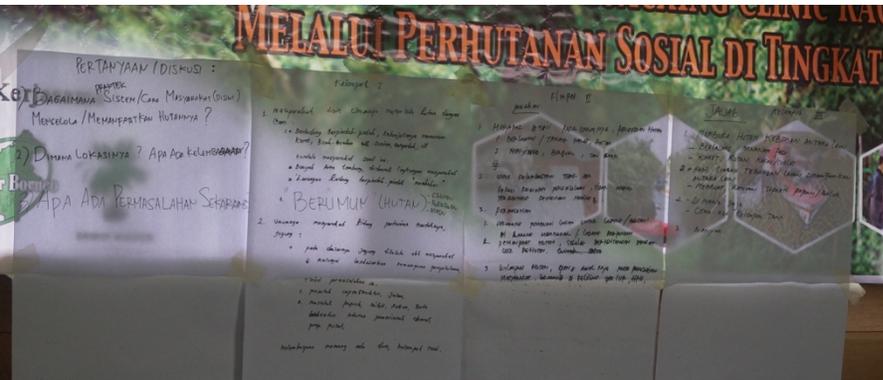
Salah satu situs terdekat yang dapat ditemui, tepat di pinggir jalan masuk ke Muara Malungai adalah Batu Utek. Jaraknya dari jalan utama hanya sekitar 100 meter dengan berjalan kaki.





Batu Utek adalah penamaan untuk sebuah tempat menyimpan tulang belulang para tokoh dan tetua, juga masyarakat umum yang keluarganya telah melaksanakan ritual adat Wara. Artinya, jasad tidak hanya selesai setelah dikuburkan, tetapi ada perlakuan khusus berikutnya, setelah sekian lama jasad dikubur, kemudian jika keluarga telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk melakukan ritual adat Wara, maka tulang belulanginya digali, diangkat, dibersihkan, dan dipindahkan ke Batu Utek.

Upacara Pemindahan tulang ini kini sudah mulai ditinggalkan oleh Sebagian besar masyarakat, dikarenakan upacara Wara itu selain membutuhkan biaya yang cukup besar juga waktu pelaksanaannya yang membutuhkan waktu berhari-hari.



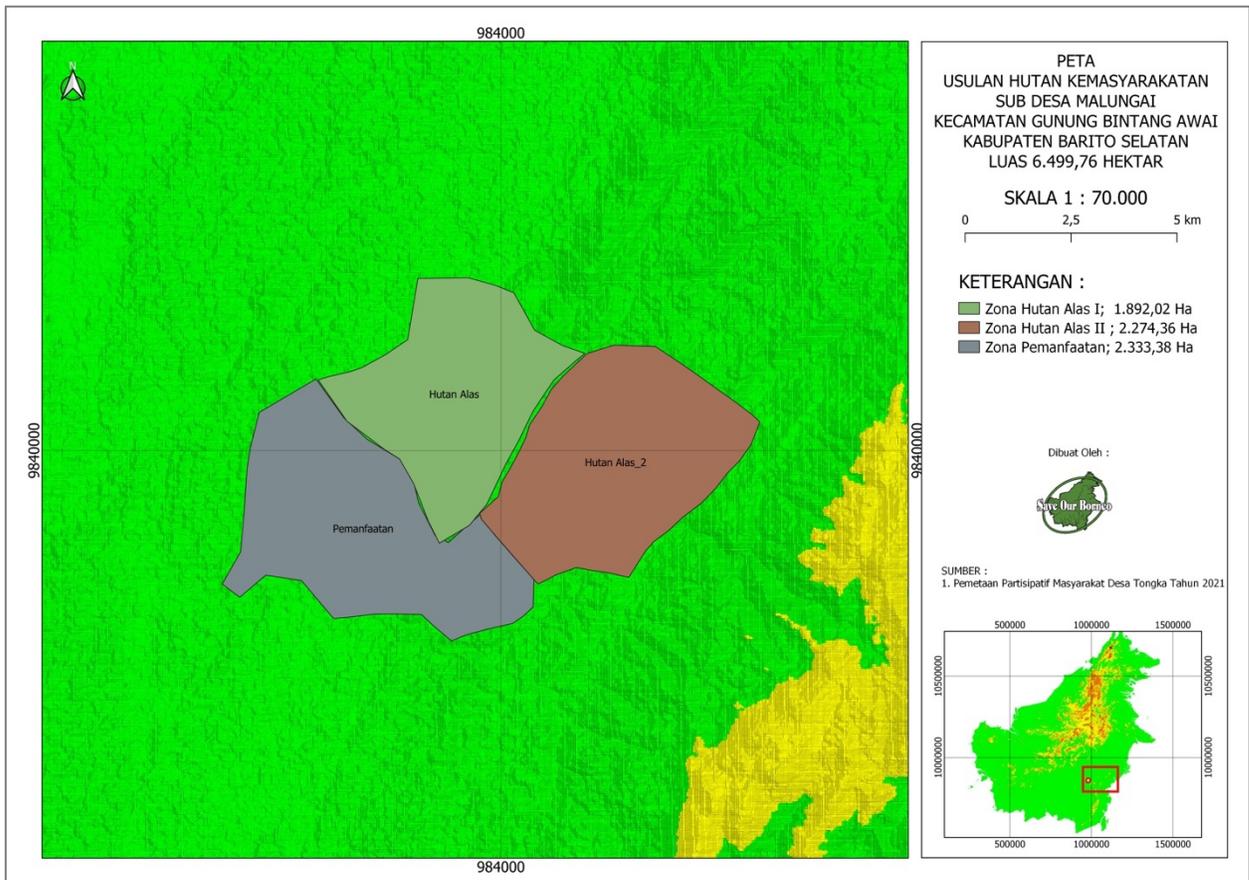
2.2.6. Potensi Yang Ingin Didorong

Potensi usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat sub-desa Muara Malungai pada kawasan mereka dapat berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Ekowisata, dan wana tani (agroforestry).

2.2.7. Skema PS di Muara Malungai

Selain assessment, tim juga mengadakan sosialisasi dan diskusi tentang Perhutanan Sosial (PS). Kegiatan ini diadakan di Balai Pertemuan dan dihadiri lebih dari 30 orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Dari kegiatan ini, kemudian disepakati bahwa masyarakat Muara Malungai akan mengajukan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal ini dipilih masyarakat sebagai usaha untuk mengamankan hutan mereka dari ancaman industri ekstraktif yang kapan saja bisa masuk dan operasional di wilayah mereka.



Bentuk keseriusan masyarakat ini tidak hanya dengan mulai mengumpulkn data dan identitas diri mereka kepada tim. Namun, masyarakat juga akhirnya membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) bernama Bawo Malungai beserta struktur organisasi di dalamnya. Mereka juga sepakat mengajukan luas kawasan sebesar 6649,06 Ha, dengan rincian zonasi sebagai berikut:

1. Zona pemanfaatan 2333,38 Ha
Merupakan wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas mata pencaharian sebagai sumber dengan system tumpang sari dan berkebun, seperti kebun pisang, jagung, kakao, karet, berladang, dan lainnya



2. Zona hutan alas satu seluas 1892,02 Ha
Merupakan wilayah yang berfungsi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati masyarakat yang biasanya dilakukan dalam melakukan aktivitas pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti berburu dan mencari madu hutan. Selain itu juga terdapat gua yang memang dilestarikan oleh masyarakat, seperti Liang Saranalay, Liang Gepeng, Sarang Putting, Liang Jerang, Kolahandrung.
3. Zona hutan alas dua seluas 2274,36 Ha
Merupakan wilayah yang berfungsi sebagai perlindung keanekaragaman hayati dan juga aktivitas sosial-budaya masyarakat secara turun-temurun. Di wilayah Zona hutan alas dua ini sebagai sumber air masyarakat, dan aktivitas hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, mencari gaharu, mencari damar.

Jenis kayu yang terdapat di Zona Hutan Alas satu dan dua (Hutan Lindung Masyarakat) di kelompok menjadi 2 jenis, yaitu yang dilarang dan yang tidak dilarang.

- Jenis kayu yang dilarang untuk ditebang ialah Durian, Layung, Cempedak, Ulin, Sintuk, Karuing, kayu jenis buah-buahan, Pungsi, Tengkwang
- Jenis kayu yang tidak dilaranag untuk ditebang dan dapat dimanfaatkan ialah Meranti, Mahang, Meranti campuran, Bawang, Gahang.



III. PENUTUP & RENCANA SELAJUTNYA



Dari hasil pelaksanaan assesment awal dan sosialisasi Perhutanan Sosial di dua desa yang terletak di dua wilayah Kecamatan dan di dua kabupaten berbeda di Provinsi Kalimantan Tengah ini telah banyak memberi gambaran tentang bagaimana pengelolaan Kawasan hutan di pulau Kalimantan, perebutan ruang kawasan hutan skala besar dibanyak tempat di Pulau terbesar kedua di Indonesia ini telah dimenangkan oleh pihak yang memiliki modal besar, yakni korporasi industri ekstraktif baik itu HPH (IUPHHK), perkebunan sawit ataupun pertambangan. Hal ini telah terjadi di banyak tempat dan dapat dibuktikan dengan sangat cepatnya pemerintah merespon dan memenuhi proses izin mendapatkan konsesi yang diusulkan oleh korporasi-korporasi industri skala besar dibandingkan dengan proses usulan perhutanan sosial yang memakan waktu cukup lama, hingga tahunan.

Namun demikian masih ada sedikit harapan dari masyarakat terhadap skema perhutanan sosial. Keinginan masyarakat dilokasi sasaran kegiatan ini terhadap skema PS masih cukup tinggi, hanya saja hal tersebut masih perlu dibarengi dengan semangat proaktif dari banyak kalangan untuk memfasilitasi usulan-usulan PS oleh masyarakat disekitar kawasan hutan. Pemerintah sampai dengan saat ini terkesan Pasif/ menunggu usulan dari masyarakat, padahal masalah yang dihadapi di tingkat tapak terus bertambah, masyarakat masih memerlukan Pendampingan dari berbagai elemen, dalam hal ini NGO local maupun nasional, seperti Save Our Borneo dan Sawit Watch. Meskipun mengambil peran sebagai pendamping dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun kami terus akan berupaya membantu/ mendampingi masyarakat untuk mempersiapkan berbagai dokumen prasyarat usulan berupa peta, dan kelengkapan lainnya bahkan sampai menyampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK yang merupakan pemegang kuasa pengelolaan Kawasan Kehutanan di Indonesia.

Kedepan dengan adanya upaya legal pemberian hak akses/ kelola Kawasan hutan kepada masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial ini diharapkan kedepannya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat lokal baik didalam dan diluar Kawasan hutan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang melanggar dan tidak berkonsekuensi hukum. Masyarakat menjadi memiliki akses terhadap tanah dan hutan dengan sistem pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.

Masih banyak kerja yang harus dilakukan, semoga Laporan aktivitas Assesment Awal dan Sosialisasi Perhutanan Sosial ini dapan memberikan gambaran kepada pembacanya, terutama untuk masyarakat Jerman yang telah mendukung upaya ini melalui Rettet den Regenwald.



Rencana Selanjutnya

Setelah Kegiatan Asessment Awal dan Sosialisasi ini dilakukan, tim sampai sekarang sedang Menyusun dan melengkapi dokumen-dokument pendukung yang menjadi syarat untuk pengajuan kepada Menteri KLHK, berikut matrik tahapan-tahapan yang akan dikerjakan kemudian ;

Rencana Tindak Lanjut [RTL] Pengusulan PS di Barito Utara – Barito Selatan

No	Kegiatan	Lokasi	Keterangan	Target Capaian	
1	SK Kepala Desa Pembentukan KTH Bawo Malungai	Malungai	BA Pembentukan KTH, SK Desa Pembentukan KTH	L	Agust - September
2	SK Kepala Desa pembentukan KTH Perewali Lisat Lestari	Desa Tongka	Ketua KTH ‘Bawo Malungai’	L	Agust – September
3	Perdes Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Perewali Lisat Lestari	Desa Tongka	Ketua KTH ‘Perewali Lisat Lestari’	DP	Minggu II Oktober
4	Pengumpulan Profil wilayah usulan	Desa Tongka & Malungai	Ketua KTH ‘Bawo Malungai’ Ketua KTH ‘Perewali Lisat Lestari’	DP	Minggu II Oktober
5	Pengumpulan Foto copy KTP & KK identitas pengusul	Desa Tongka & Malungai	Ketua KTH ‘Bawo Malungai’ Ketua KTH ‘Perewali Lisat Lestari’	L	Agust - September
6	Pengolahan Peta Usulan HKm Bawo Malungai & Hutan Desa Tongka “Perewali Lisat Lestari”	Palangka & Bogor	Pendamping SoB & Sawit Watch	DP	Minggu III Oktober
7	Membuat Surat Balasan Permohonan pendampingan dari KTH ‘Bawo Malungai’ dan KTH ‘Perewali Lisat Lestari’	Palangka & Bogor	Pendamping SoB & Sawit Watch	L	September
8	Penyusunan dokumen	Palangka & Bogor	Pendamping SoB & Sawit Watch	DP	Minggu III Oktober
9	Pengolahan data peta dan penggarap	Palangka & Bogor	Pendamping SoB & Sawit Watch	DP	Minggu IV Oktober
10	Klarifikasi dokumen	Desa Tongka & Malungai	Ketua KTH ‘Bawo Malungai’ Ketua KTH ‘Perewali Lisat Lestari’ Pendamping SoB	B	Minggu I November
11	Pembundelan dokumen	Kandui & Palangka	Ketua KTH ‘Bawo Malungai’ Ketua KTH ‘Perewali Lisat Lestari’ Pendamping SoB	B	November - Des
12	Pengajuan usulan ke kantor kehutanan kabupaten/provinsi, pokja PPS, BPSKL Kalimantan, Dirjen PSKL – KLHK	2 bulan	Ketua KTH, Ketua LPHD, Pendamping (SoB dan Sawit Watch)	B	Desember - February

L : Lengkap - DP : Dalam Proses – B : Belum

